

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.* (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan.* (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* (2012) Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* (2004). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah.* (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang *Perubahan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (2009). Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*. (2004) Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2000). Jakarta.

Andrei, P. (2013). 'The analysis of the financial performance of local authorities in the context of budgetary constraints'. *Management & marketing challenges for the knowledge society*. Univesity of Lasi. Vol. 18 No. 3 (pp 553-574).

Ayuningsih, D. (2016). 'Pengaruh *size, wealth, leverage*, belanja daerah dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah'. *Skripsi*. Insititut Agama Islam Negeri Surakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016*. Jakarta.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik*, Jakarta: Erlangga.

Bastian, I. (2011). *Audit sektor publik*, Jakarta: Salemba Empat.

Darwanis, & Saputra, R. (2014). 'Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah'. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Syiah Kuala. Vol. 1 No. 2.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilligan, Thomas W., and John G. Matsusaka (2001). "Fiscal policy, legislature size, and political parties: evidence from state and local governments in the first hal of the 20th century." *National Tax Journal*. University of Southern California. Vol. LIV. No.1.
- Hadi, N. (2014). *Corporate social responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta Selatan: Salemba.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akutansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). *Teori akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilmiyah, N.M, Dewata, E., Sarikadarwati. (2017). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2015'. *Jurnal Akuntansi, Eknomi, dan Manajemen Bisnis*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Vol. 5 No. 1.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaludin. (2012). 'Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh'. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 1 No. 1, hlm. 15.
- Kusumawardani, M. (2012). 'Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia'. *Accounting analysis journal*.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Erlangga.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta: Andi.

- Masdiantini, P.R dan Erawati, N.M.A. (2016). 'Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit bpk ri pada kinerja keuangan'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14 No.02*. Universitas Udayana.(Hlm 1150-1182).
- Minarsih, R.A. (2015). 'Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah'. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). 'Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah'. *KOMPARTEMEN* Vol. 15 No. 1.
- Noviyanti, N. A. & Kiswanto. (2016). 'Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah'. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Patrick, P. A. (2007). 'The determinants of organizational innovativeness:the adoption of gasb 34 in pennsylvania local government'. *Thesis : Pennsylvania State University*.
- Putry, N.A.C & Badurudin, R. (2017). 'Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap opini audit dan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta'. *JRMB*. STIE YKPN Yogyakarta. Vol. 12 No. 1.
- Renyowijoyo, H. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). 'Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah'. *Accounting analysis journal*.
- Simanullang, G. (2013). 'Pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di provinsi kepulauan riau tahun 2008 – 2012'. *Umrah Journal Of Accounting Vol. 01 No 01*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. (Hlm 01-24).
- Sarwono, J. (2015). *Rumus-rumus populer dalam SPSS 22 untuk riset dan skripsi*, Yogyakarta: Andi Offset.

Sumarjo, H. (2010). 'Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah'. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suryaningsih, N.M dan Sisdyani, E. A. (2016). 'Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah'. *E-Jurnal Akuntansi Vol.15.2*. Universitas Udayana. (Hlm. 1453-1481).

Wenny, C. D. (2012). 'Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di propinsi sumatera selatan'. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 2 No. 1*.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.hlm 2-48.

